

BENTUK IMPLEMENTASI KONSEP KOTA TAMAN DI JEPANG: KONSEPTUALISASI DAN PRINSIP PERENCANAAN DALAM URAIAN SEJARAH

Novi Maulida Ni'mah dan Sudaryono

Jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada
Jl. Grafika No.2, Sekip, Yogyakarta 55281
E-mail: sudaryono@ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini meninjau generalisasi sejarah implementasi konsep Garden City di Jepang. Dengan menggunakan metode analisis isi, penelitian ini menjelaskan, menginterpretasikan dan menemukan perubahan-perubahan fenomena tersebut dari berbagai literature. Implementasi konsep Garden City di Jepang berkaitan dengan sejarah terbukanya Jepang setelah Restorasi Meiji. Pelajaran yang dapat ditarik dari prinsip-prinsip Jepang seperti 'Semangat Jepang Kuno' dan 'Memerintah untuk Kepentingan Masyarakat' menjadi suatu alternatif untuk pembangunan sesuai dengan konteks Garden City di Jepang. Diawali dengan prinsip ruralisasi sebagai suatu solusi untuk masalah perkotaan dan perdesaan, konsep Garden City kemudian berkembang menjadi solusi untuk ketersediaan rumah sebagai akibat dari pembangunan kota. Tidak digunakannya lagi prinsip self contained-self sufficient berakibat pada tata guna lahan dan komunitas dengan karakter yang homogen.

Kata kunci: sejarah, konsep Garden City concept, prinsip-prinsip perencanaan, Jepang

Abstract

This research reviews the generalization of the historical description of the Garden City concept implementation in Japan. By using content analysis method, this research explained, interpreted, and found its changes phenomena which found from many related literatures. The implementation of Garden City concept in Japan is related from the history of Japan's opening after the Meiji Restoration. Lessons learned based on the Japan principle 'Spirit of the Old Japan' and 'Rule For the Benefit of the People' became the new form of knowledge in the context of alternative solution for development as it seen in the conceptualization development of the Garden City in Japan's context. Started with the ruralization principle as a solution step for both the urban and rural problems, the Garden City concept then developed in to suburban settlement area as a solution for the housing availability caused by the city development. By no longer using the self contained-self sufficient principle, there was an impact in the land use and the community that formed with the homogeneous characteristic.

Keywords: history, Garden City concept, planning principles, Japan.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Pertumbuhan kota paska revolusi industri 1769 beserta permasalahan yang menyertainya telah berdampak pada timbulnya kesadaran masyarakat terhadap perencanaan kota yang terpadu. Salah satu bentuk awal konsep perencanaan kota baru tersebut adalah konsep *Garden City* (Kota Taman) yang dicetuskan

oleh Ebenezer Howard. Melalui paradigma yang mengarah pada terciptanya lingkungan fisik dan sosial yang ideal diharapkan konsep tersebut dapat menjaga kelangsungan hidup masyarakat kota dan hubungannya dengan alam. (Catanese dan Snyder, 1996: 16; Zahnd, 1999: 37; Clark, 2003: 87)

Konsep *Garden City* kemudian memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap

perkembangan perencanaan kota modern di dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mumford yang dikutip oleh Clark (2003: 87) bahwa:

“Garden Cities of Tomorrow, ‘has done more than any other single book to guide the modern town planning movements and to alter its objectives’.” (Mumford dalam Clark, 2003: 87)

Jepang menjadi salah satu Negara yang telah turut mengimplementasikan konsep *Garden City* dalam sejarah perencanaan kotanya. Dimulai pada tahun 1868 ketika terjadi Restorasi Meiji yang membawa Jepang kepada masa pembaratan (*westernization*) dan modernisasi (*modernisation*) setelah lebih dari 200 tahun terisolasi pada masa Tokugawa, industrialisasi yang telah masuk ke Jepang dengan cepat merubah struktur kegiatan negara tersebut dari pertanian menjadi industri. Urbanisasi kemudian terjadi ke kota-kota industri di Jepang. Hal tersebut merubah bentuk keruangan kota yang semakin padat dan pada akhirnya meluas ke arah area suburban. Tokyo sebagai ibukota negara sekaligus pusat ekonomi mengalami peningkatan jumlah penduduk dari 1,4 juta menjadi 3,7 juta jiwa selama kurun waktu 40 tahun (1880 s.d 1920) (Allinson, 1979: 19).

Konsep *Garden City* kemudian masuk ke Jepang pada tahun 1905. Tahun 1907 pemerintah Jepang menerbitkan buku yang berjudul *Den'en Toshi* sebagai interpretasi dari terminologi *Garden City*. Hingga kemudian kota *Garden City* pertama di Jepang, Den'enchofu, dibangun pada tahun 1918. (Sorensen, 2002: 137; Oshima, 1996: 142).

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa bentuk implementasi konsep *Garden City* di Jepang melalui sejarah dan bentuk perencanaan kota yang telah dibangun. Catanese dan Snyder (1996:2) berargumen

bahwa perencanaan kota biasanya menghadapi kondisi fisik, ekonomi, sosial, dan politik yang membudaya sejak lama sehingga sejarah menjadi penting untuk mengetahui kecenderungan perubahan dan pertumbuhan yang terjadi agar dapat memelihara kondisi yang ada ataupun memperbaikinya. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan oleh Watanabe dalam Ward (1992: 69), bahwa sangat penting untuk mengetahui proses sebuah konsep perencanaan diterapkan pada sebuah negara. Proses tersebut dapat memperlihatkan bagaimana sebuah konsep dipahami secara benar, atau terdapat perbedaan pemahaman, atau bahkan telah diubah, diasimilasikan, dimodifikasi, dan bahkan dihilangkan sepenuhnya dari konsep aslinya menuju konsep baru.

Garden City merupakan salah satu konsep perencanaan kota yang berupaya menjadi solusi bagi permasalahan kota akibat perkembangan industrialisasi dan kapitalisme. Jepang sebagai salah satu negara yang mengimplementasikan konsep tersebut pada awal mula perkembangannya, secara konseptual maupun prinsip-prinsip perencanaan, tentu tidak terlepas dari kondisi sejarah Jepang, baik sejarah umum maupun terkait dengan sejarah perencanaan kotanya. Melalui sebuah uraian sejarah penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan mengapa dan bagaimana konsep *Garden City* diterapkan di Jepang. Sejarah penerapan konsep *Garden City* dan deskripsi dari contoh kota di Jepang nantinya akan menjadi objek dalam penelitian ini dalam mengidentifikasi perubahan konsep yang terjadi dan mengabstraksikan konsep tersebut dalam konteks Negara Jepang.

1.2 Metode Penelitian

Dalam mencapai konstruksi bangunan penelitian bentuk implementasi konsep *Garden*

City di Jepang, prosedur penelitian berupaya menghasilkan uraian data dan pembahasan yang bersifat deskriptif. Penelitian berkembang pada tipe *content analysis* (analisis isi) atau metode dokumenter yaitu sebuah proses penjabaran data-data tekstual sebagai obyek penelitian ke dalam bentuk uraian deskriptif-historis-naratif yang diharapkan mengarah pada generalisasi tesis (Surakhmad, 1978: 123). Dengan lokus Negara Jepang penelitian ini berjalan dengan batasan substansi yaitu sejarah penerapan konsep *Garden City* di Jepang. Adapun dokumen yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah berbagai literatur baik buku maupun jurnal yang membahas mengenai sejarah dan uraian mengenai konsep *Garden City*, sejarah Jepang secara umum, khususnya sejarah pada masa Meiji (1868-1912) dan Taisho (1912-1926), serta sejarah perencanaan kota di Jepang terutama yang terjadi pada kedua periode kekaisaran tersebut.

2. Konsep *Garden City*

2.1 Latar belakang konsep *Garden City*

Pertumbuhan kota yang cepat serta masalah-masalah yang timbul menyertainya, baik di kota maupun di desa, telah menimbulkan gerakan reformasi pada akhir abad ke-19. Salah satunya mengenai pembuatan konsep-konsep perencanaan kota yang berpijak pada konsep kota romantis anti revolusi industri. (Catanese dan Snyder, 1996: 16)

Salah satu konsep yang cukup berpengaruh adalah konsep *Garden City* atau Kota Taman oleh Ebenezer Howard. Kontribusi besarnya adalah pembuatan konsep *Garden City* dengan menerbitkan buku yang berjudul *Tomorrow: A Peaceful Path to Social Reform* pada tahun 1898 yang kemudian diterbitkan kembali pada tahun 1902 dengan judul *Garden Cities of Tomorrow*. Howard menggambarkan Kota Taman tersebut sebagai solusi untuk

mengurangi kepadatan kota-kota industri dengan membangun kota baru di luar kota industri tersebut yang berpijak pada konsep kota taman tanpa menghilangkan unsur industri di dalamnya.

2.2 Konsep *Garden City*

Berdasarkan uraian Ebenezer Howard dalam *Garden Cities of Tomorrow* (1946 dan 1967) terdapat 2 karakteristik utama dalam konsep *Garden City* yaitu karakter fisik dan karakter sosial. Karakter fisik digambarkan dengan diagram-diagram magnet kota-desa (*The Town-Country Magnet*) yang terdiri dari *The Three Magnets* (Tiga Magnet), *The Garden City* (Kota Taman), *Garden City Centre* (Pusat Kota Taman), *Satellite Centers* (Pusat-pusat Satelit), dan *Polycentric Social City*. Sedangkan karakter sosial muncul pada intepretasi masing-masing gambar dan uraian Howard dalam bukunya yang kemudian disebut prinsip-prinsip kota sosial (*Social Cities*).

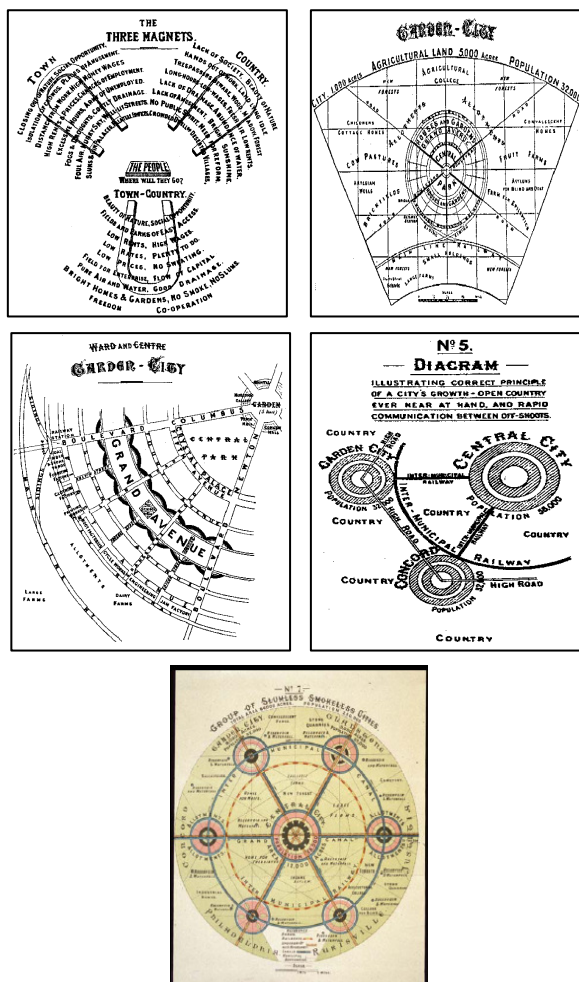
Dengan dasar pengetahuan mengenai perencanaan kota, konsep *Garden City* sebagai sebuah perencanaan kota baru kemudian dijabarkan ke dalam beberapa prinsip yaitu:

1. Derajat prinsip yang membentuk kota baru sebagai kota yang mandiri tidak bergantung pada kota utama baik secara fisik (sarana prasarana) maupun sosio-ekonomi yaitu *self containment* (*self contained-self sufficient*);
2. Perbedaan pola penggunaan lahan;
3. Tingkat keseimbangan komunitas;
4. Derajat pengelolaan kota (*self government*);
5. Ukuran/luasan kota.

Penjabaran tersebut kemudian dipertegas ke dalam bentuk yang akan dilihat dalam implementasi *Garden City* di Jepang:

1. Keterkaitan Kota Utama dengan *Garden City* yang mengarah pada prinsip *self*

- contained-self sufficient*;
2. Prinsip penggunaan lahan dan desain tapak kawasan;
 3. Perkembangan penduduk dan ciri komunitas.



Gambar 1. Diagram *The Town Country Magnet* (Secara urut: *The Three Magnets*, *The Garden City*, *Garden City Centre*, *Satellite Centers*, *Polycentric Social City*)
Sumber: Ebenezer Howard, 1946

3. Implementasi *Garden City* di Jepang

3.1 Restorasi Meiji

Diuraikan oleh Pyle (1988: 1-3), Jepang pada tahun 1868 mengalami titik tolak baru dalam perubahan sejarahnya. Masa tersebut dikenal sebagai tahun Restorasi Meiji yaitu masa revolusi besar yang dilakukan oleh sebagian pemimpin negara Jepang dengan mengubah

bentuk pemerintahan menjadi kekaisaran tunggal. Masa ketika kekuasaan Shogun Tokugawa beralih menjadi sistem kekaisaran yaitu Kekaisaran Meiji. Sebuah pemerintahan baru, bersatunya kekuatan nasional, yang diyakini akan dapat menghadapi tantangan global, yaitu bentuk paham sosial dan ekonomi dunia barat.

Perubahan besar tersebut terjadi ketika pengaruh Barat dalam kehidupan masyarakat Jepang pada masa Tokugawa tidak dapat terhindarkan lagi. Gejolak politik dalam pemerintahannya pun terjadi. Hal-hal baru yang berkembang di dunia barat, baik berupa paham-paham, ilmu pengetahuan, makanan, pakaian, peralatan-peralatan militer, semuanya membangkitkan ketertarikan untuk dapat mengetahui dan mempelajarinya. Walaupun tidak signifikan, budaya barat pelan-pelan tetap dapat masuk ke dalam masyarakat Jepang, melalui buku-buku barat yang telah dikirimkan ke Jepang maupun dari pemaparan para orang Jepang yang telah melihat sendiri perkembangan budaya barat melalui perjalanannya ke luar negeri.

Tepatnya setelah tahun 1853 ketika Komodor Matthew C. Perry dari Amerika Serikat yang pada akhirnya dapat bernegosiasi untuk membuka perdagangan bebas di Jepang telah menimbulkan dilema pada masyarakat Jepang. Terbukanya perdagangan tersebut secara nyata telah membuka mata masyarakat Jepang terhadap perkembangan yang telah terjadi di luar negara mereka. Adanya stagnasi dalam pemerintahan Tokugawa yang cenderung konservatif dan feodal; ketidakterbukaan sistem politik Tokugawa yang pada akhirnya membuat masyarakat Jepang tertinggal dari bangsa lainnya; dan permasalahan ekonomi seperti kesenjangan dan tidak meratanya kesejahteraan di akhir masa Tokugawa telah turut menjadi dorongan timbulnya gejolak di

masyarakat (Hall, 1990: 203). Krisis yang terjadi di akhir masa Tokugawa tersebut menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri oleh sebagian kalangan masyarakat Jepang terkait dengan kerentanan terhadap perkembangan budaya barat yang masuk.

Harus diakui bahwa setelah tahun 1853-1871 adalah masa ketika pengaruh eksternal cukup besar dalam kehidupan masyarakat Jepang. Kesadaran akan ancaman terhadap keamanan negara muncul seiring dengan keinginan untuk merubah keadaan negara Jepang saat itu. Selain itu, ketidaksesuaian konsep dasar awal pembentukan Jepang yang berlandaskan pada kekuasaan kaisar sebagai seorang simbol pemersatu bangsa terhadap bentuk pemerintahan shogun yang terdiri dari *Daimyo* atau pemerintah lokal turut mengemuka. (Hall, 1990: 253; Morton, 1984: 144).

Tekanan-tekanan internal dan eksternal tersebut kemudian memunculkan gerakan-gerakan yang mengarah pada perubahan Jepang secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Puncaknya, pada tahun 1868 terjadilah sebuah revolusi besar di Jepang yang disebut sebagai Restorasi Meiji, sebuah perubahan besar dalam sistem pemerintahan Jepang.

3.2 Kebijakan Pembangunan dalam Era Meiji

Dimulai pada masa tahun 1868 ketika Restorasi Meiji terjadi hingga pada pergantian abad telah terjadi perubahan besar dalam kegiatan negara Jepang. Negara yang semula menutup diri selama lebih dari 200 tahun dari berbagai pengaruh perkembangan di dunia kemudian membuka diri. Terbukanya Jepang terhadap masuknya ilmu pengetahuan dan budaya barat serta pengiriman orang Jepang untuk belajar ke Eropa dan Amerika Serikat telah memiliki peran tersendiri bagi masuknya

konsep-konsep pemikiran barat. Pengetahuan mengenai industri, bentuk pemerintahan, pola pendidikan, dan kemajuan kegiatan militernya, semuanya menjadi sebuah prioritas untuk kemudian dipelajari. Jepang secara terbuka menerima berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dicoba untuk diaplikasikan (Sorensen, 2002: 49).

Oleh Hall (1990: 253) dan Morton (1984: 153), pemerintah Jepang sendiri, tidak ingin perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Jepang mengarah pada pembaratan tetapi lebih kepada proses modernisasi. Jika pembaratan merupakan bentuk ungkapan kepasifan masyarakat Jepang dalam menerima budaya barat dan meninggalkan budaya asli mereka. Maka modernisasi lebih kepada upaya aktif untuk menyerap segala bentuk pengetahuan dan memilih model terbaik yang akan memperkuat negara Jepang. '*The Spirit of Old Japan*' tetap dijaga sebagai prinsip fundamental dalam membangun sebuah identitas negara yang sepadan dengan perkembangan yang telah dilakukan oleh negara-negara barat.

Proses modernisasi Jepang pada dasarnya dihadapkan pada tuntutan penguatan sistem politik, ekonomi, dan militer. Prioritas terdepan dalam pembangunannya kemudian diarahkan pada 3 (tiga) hal tersebut. Kekuatan politik dan keamanan negara dianggap sebagai jaminan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Ketatnya kontrol pemerintah pusat dengan tidak memberikan ruang untuk sebuah perbedaan ataupun gerakan-gerakan oposisi merupakan sebuah usaha untuk membangun kekuatan nasional. (Sorensen, 2002: 53, 54)

Dengan alasan membangun kekuatan nasional pula, pembangunan ekonomi di Jepang kemudian fokus terhadap pengembangan kegiatan industri. Peningkatan infrastruktur administrasi dan penyusunan kebijakan

industri adalah 2 (dua) kebijakan besar yang muncul pada waktu tersebut. Infrastruktur administrasi yang di dalamnya termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja serta kebijakan industri yang salah satu bentuknya adalah transfer teknologi telah membuka kebudayaan Jepang kepada sebuah peradaban barat. (Francks, 1990: 31)

Kebijakan ekonomi tersebut kemudian membawa kepada perubahan yang sangat mencolok dan menjadi sebuah transformasi yang cepat yaitu perubahan kegiatan ekonomi negara yang semula agraris menjadi industrialis. Perubahan tersebut diyakini menjadi bagian penting dari proses modernisasi Jepang. Pemerintah Jepang menyadari bahwa penyebaran budaya barat pada masa tersebut merupakan salah satu bentuk superioritas yang mengarah pada bentuk penjajahan, maka Meiji kemudian berusaha untuk membangun dan meningkatkan kemampuan militer dan industri untuk mencegah terjadinya penjajahan oleh barat. (Sorensen, 2002: 48).

Seperti halnya negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika Serikat, Jepang juga mengalami kondisi pembangunan industri yang menyebabkan pertumbuhan penduduk, perluasan area di perkotaan, dan degradasi lingkungan di kota-kota industri. Pada masa Meiji, peningkatan urbanisasi ke kota sebagai dampak perkembangan ekonomi industri telah menyebabkan besarnya pertumbuhan penduduk di kota-kota utama seperti Tokyo, Osaka, dan Nagoya (Sorensen, 2002: 86-87). Tetapi pada masa tersebut kebutuhan pengelolaan kota yang lebih baik dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan perluasan area kota belum dapat dilakukan dengan baik oleh pemerintah Jepang. Kebijakan pemerintah pusat yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan

memperkuat birokrasi pemerintahan pusat telah membuat lemahnya pemerintahan lokal. Berbagai keputusan pembangunan pemerintah pusat yang cenderung pro pembangunan industri pada wajah kota telah meninggalkan aspek lainnya terkait dengan kebutuhan masyarakat terabaikan. Kecenderungan untuk bergantung pada peran serta swasta juga belum dapat teroptimalkan karena lemahnya keputusan-keputusan pemerintah lokal dalam menciptakan struktur ruang di wilayahnya. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan perencanaan kota terkait kepemilikan bangunan dan ketersediaan permukiman layak bagi kaum miskin kota belum dapat diatasi (Sorensen, 2002: 84). Secara umum, kondisi yang muncul adalah meluasnya area kumuh kota industri dan tumbuhnya persoalan sosial, moral dan politik. Perkembangan perencanaan kota modern yang pada akhir abad ke 19 telah muncul di negara-negara barat kemudian menjadi suatu kebutuhan dalam perkembangan kota-kota di Jepang.

Walaupun urbanisasi telah menjadi fenomena ketika masa Tokugawa, namun perbedaan yang terjadi adalah basis ekonomi yang telah berubah dari pertanian menjadi industri yang kemudian turut mengubah pola dan karakteristik perkembangan kota. Terlebih di masa Meiji ini pula, sebuah peraturan baru mengenai pajak tanah telah diperbaharui dan turut berpengaruh pada kondisi pertanian Jepang. Kebijakan tersebut dimulai dengan adanya proses sertifikasi tanah yang memunculkan kepemilikan lahan pada tahun 1872. Kemudian pada tahun 1873 pemerintah menerbitkan *Land Tax Act* yang menyebutkan besaran pajak senilai 3% dari nilai tanah. Pemilikan ini pada akhirnya membentuk kelas dalam masyarakat petani yang terdiri dari petani kecil dan tuan tanah. Pada era 1890-an ketika terjadi resesi dan deflasi ekonomi di Jepang, desa mengalami krisis. Dengan adanya

kebebasan penjualan tanah serta meningkatnya intensifikasi pertanian desa membuat petani kecil kemudian memilih untuk menjual tanahnya dan berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan.

Perubahan-perubahan tersebut seharusnya menjadikan perencanaan kota sebagai aspek penting yang kemudian diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah Jepang. Namun, pemerintah Jepang dalam mengantisipasi perubahan wajah kota hanya mengambil kewenangan dalam wilayah-wilayah yang terkait dengan aksesibilitas kota terhadap kegiatan industri seperti area pemerintahan, pabrik-pabrik, dan infrastrukturnya. Memang, pada awal era Meiji, pemerintah lebih fokus kepada pembuatan undang-undang, kebijakan keuangan, dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Sehingga dalam hal perencanaan dan pembangunan kota pemerintah tidak memberikan prioritas khusus (Sorensen, 2002: 60). Bahkan, untuk permasalahan peningkatan kebutuhan permukiman kota pun tidak ada perubahan signifikan karena pembangunannya bergantung pada investasi swasta.

Keyakinan besar pemerintah terhadap penguatan negara melalui industri membuat kegiatan ini menjadi prioritas penting dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan. *'Rule For the Benefit of The People'*, menjadi nilai kebenaran dalam pemerintahan Meiji seperti halnya ketika masa Tokugawa. Menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai sebuah kebijakan, pemerintahan Meiji telah mengarahkan pembangunan industri menjadi sebuah kepentingan bersama. (Hall, 1990: 184).

Namun sentralisasi yang memang diterapkan pada masa Meiji telah membawa perubahan iklim yang berbeda.

"The role of government was to strengthen the country while the role of the people was to serve the emperor; his officials were to be respected and obeyed, continuing the tradition of "respect of authority and disclaim for the people" of the Tokugawa period. Little political space was left for the development of independent conceptions of the public good, or for activities that might support them." (Sorensen, 2002: 54)

Pembangunan suatu wilayah yang seharusnya melibatkan pemerintahan lokal dalam kewenangan yang lebih besar, tidak dapat terjadi di Jepang. Sorensen (2002: 54) menyatakan bahwa dengan perkembangan kegiatan baik sosial maupun ekonomi yang terjadi di Jepang ternyata sistem politik yang sangat pro birokrat negara telah mengakibatkan marginalisasi kepentingan para kaum kota. Kuatnya kontrol pemerintah pusat dalam setiap pembangunan wilayah pada akhirnya menyebabkan kebutuhan masing-masing wilayah tidak dapat terpenuhi dengan baik. Kelemahan posisi politik, terutama masyarakat kelas menengah telah menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat terhadap akses ruang-ruang publik.

Pemerintahan lokal yang dibentuk saat itu memang tidak dimaksudkan sebagai sistem yang dapat meningkatkan kebebasan ruang dalam membangun oleh komunitas lokal. Namun, lebih kepada perpanjangan tangan pemerintah dalam mendelegasikan kebijakannya. Kontrol pemerintah pusat cukup kuat mengikat berbagai kebijakan di tingkat lokal. Sehingga dalam hal ini pembangunan skala nasional seperti pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan rel kereta api, menjadi prioritas dibandingkan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

"In practice local authorities had little local autonomy, as virtually all decision-making authority was left with the prefecture, which

were in turn firmly under the control of central government-appointed prefectural governors and run as an arm of central government under the Home Ministry, which was established in 1873.” (Sorensen, 1992: 55)

Semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di atas merupakan bagian dari era pembangunan ekonomi modern Jepang yang pesat terjadi pada tahun 1886-1905 (Hall, 1990: 305). Hal tersebut turut didorong oleh faktor penting lainnya yang pada akhirnya juga turut memberikan pengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan industri sekaligus urbanisasi di Jepang. Faktor tersebut adalah kebijakan pembangunan nasional utama pada masa Meiji yang mengarah pada pembangunan prasarana transportasi, dalam hal ini terutama jaringan rel kereta api pada era 1870-1890, (Sorensen, 2002: 55-56). Keberadaan jaringan rel kereta api dipandang pemerintah Jepang sebagai pendukung utama berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi yang telah terjadi di barat. Terlebih perkembangan transportasi pada masa Tokugawa dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dinamika ekonomi Jepang. Perubahan besar pun terjadi pada kondisi ekonomi dan kota. Aksesibilitas yang semakin tinggi antar kota di Jepang dan peningkatan produksi oleh industri modern di area kota telah meningkatkan arus perpindahan tidak hanya dari desa ke kota tetapi juga dari kota ke kota utama seperti Tokyo dan Osaka. Peningkatan jaringan kereta api, peningkatan produksi industri, serta jaminan ke pemerintahan lokal telah berhasil meningkatkan arus urbanisasi ke kota. (Sorensen, 2002: 57-58; Rozman dalam Sorensen, 2002: 56).

3.3 Internalisasi Konsep *Garden City* di Jepang

Fenomena perluasan area kota menuju area suburban memberikan gambaran kepada

pemerintah Jepang bahwa perencanaan kota tidak lagi mencakup hanya pusat kota saja tetapi meluas ke wilayah sekitarnya (*citywide planning frameworks*) (Sorensen, 2002: 88). Pengembangan area suburban tersebut turut didukung oleh perkembangan transportasi massa kereta api yang dianggap dapat dengan cepat mengatasi persoalan mobilitas penduduk. Dijelaskan oleh Moffit (2004: 9), perkembangan pesat jaringan kereta api di seluruh negeri telah menurunkan biaya bepergian menggunakan angkutan tersebut. Sehingga memungkinkan banyak masyarakat untuk bepergian dari luar kota utama menuju pusat kota utama untuk bekerja setiap harinya. Solusi yang tidak hanya berorientasi untuk mengatasi permasalahan permukiman bagi masyarakat pekerja yang ada di kota utama tetapi juga menumbuhkan kegiatan ekonomi di tempat lain sehingga tidak terjadi pemusatan kegiatan di satu kota utama saja.

Dalam masa perkembangan kota-kota di Jepang tersebut maka masuklah konsep *Garden City* yang kemudian cukup berpengaruh terhadap perkembangan konsep perencanaan kota di Jepang. Konsep *Garden City* dianggap masuk ke Jepang pada waktu yang tepat yaitu ketika penduduk di Kota Tokyo telah mencapai 2,6 juta jiwa dengan berbagai persoalan yang menyertainya (Oshima, 1996: 140). Oleh Oshima (1996: 141) dan Moffit (2004: 6), kemunculan konsep ini juga tepat terjadi pada masa pesatnya perkembangan sarana prasarana transportasi di Jepang baik transportasi antar kota yaitu kereta api dan jaringan relnya maupun transportasi dalam kota seperti kendaraan bermotor dan jalan raya. Hal ini yang kemudian telah mendorong berkembangnya konsep area suburban di Jepang. Konsep *Garden City* dirasa dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan kota melalui pengembangan konsep bermukim di area suburban (*suburban living*).

“By means of a suburban train, one can escape the problems and ill effects of the dense industrial city to a cultured life-style in a sunny garden setting.” (Oshima, 1996: 141)

Tidak hanya solusi dalam permasalahan keruangan, dalam konsep *Garden City* ini pula pemerintah Jepang telah mendapat gambaran mengenai isu keuangan dalam pembangunan area baru yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti: siapa yang akan membiayai barang-barang publik, bagaimana menjamin pembangunan permukiman dapat dengan tepat diarahkan untuk para kaum miskin, bagaimana nilai kompensasi terhadap pembatasan pembangunan yang dilakukan, dan bagaimana pembayaran ganti rugi kepada publik terhadap peningkatan nilai lahan mereka. Isu keuangan ini pulalah yang sering dihadapi dalam upaya pembangunan sebuah wilayah dan merupakan suatu yang fundamental dalam perencanaan kota di Jepang. (Sorensen, 2002: 88-89)

Konsep *Garden City* sendiri masuk ke Jepang pada tahun 1905 melalui pengiriman buku oleh toko buku di Inggris. Diuraikan oleh Watanabe dalam Ward (1992: 70), buku tersebut merupakan uraian AR Sennett's mengenai konsep asli Ebenezer Howard tentang *Garden City* dengan judul *Garden Cities in Theory and Practice*. Sebuah buku yang terdiri dari 1400 halaman dan 300 ilustrasi. Pengiriman buku tersebut ditujukan kepada Biro Pemerintah Lokal Kantor Kementerian (*the Local Government Bureau of the Home Ministry*) dan diterima oleh kepala pejabat setempat yaitu Tomoichi Inouye. Dialah yang kemudian berinisiatif untuk membuat buku mengenai *Garden City* dalam konteks negara Jepang.

Buku yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Jepang melalui *the Local Government Bureau of the Home Ministry* merupakan bentuk internalisasi konsep *Garden City* kepada masyarakat Jepang yang dimulai

tahun 1907. Buku tersebut berjudul *Den'en Toshi*, sebuah istilah dalam bahasa Jepang yang dianggap paling tepat dalam menginterpretasikan konsep *Garden City*. Pada tahun yang sama oleh Oshima (1996: 141) dinyatakan bahwa terdapat artikel mengenai *Letchworth Garden City* yang masuk ke Jepang dengan judul *Hanazono Toshi* atau *Floral Garden City*. Artikel tersebut menjadi bentuk gambaran nyata mengenai realisasi konsep *Garden City* dalam pembangunan kota. *Den'en Toshi* sendiri dalam bahasa Jepang berarti desa atau perdesaan, istilah yang lebih mengarah pada nilai-nilai anti-kota.

“Garden Cities relocate the workers who have swarmed to cities, and with them make completely new rural villages. Land is lent to industrial workers who in their spare time cultivate it. In this way, they pursue their lives as both industrial and agricultural workers.” (Home Ministry, 1907, p. 74-75 dikutip Watanabe dalam Ward, 1992: 71)

Dalam pernyataan di atas digambarkan bahwa terdapat perbedaan intepetasi antara *Garden City* di Jepang dengan konsep aslinya. Adanya pendefinisian *Garden City* sebagai kota pertanian telah membuat konsep *Garden City* di Jepang lebih mengarah pada kondisi peralihan kepada kegiatan yang bersifat kedesaan (*ruralization*). Nilai-nilai anti kota tersebut digambarkan pada kondisi keseimbangan kerja penduduk kota *Garden City* nantinya yang bekerja pada sektor industri dan pertanian sekaligus. Latar belakang dari intepetasi ini tidak hanya sekedar keterbatasan pemahaman dari segi bahasa tetapi lebih jauh lagi, intepetasi yang diuraikan di dalam buku *Den'en Toshi* merupakan bentuk propaganda dari *the Local Government Bureau of the Home Ministry* dalam rangka Kampanye Kemajuan Daerah (*Local Improvement Campaign*). Kampanye tersebut merupakan bagian dari usaha pemerintah Jepang pada

masa tersebut untuk memperkuat pemerintahan lokal agar dapat lebih mandiri.

Kemudian pada tahun 1908, Takayuki Noma, seorang konsultan paruh waktu yang bekerja di *the Local Government Bureau of the Home Ministry* memiliki kesempatan untuk berkunjung ke *Letchworth Garden City* dan bertemu langsung dengan Ebenezer Howard. Dengan adanya kunjungan langsung tersebut, seharusnya terdapat interpretasi yang lebih tepat terhadap konsep *Garden City*. Namun, realita yang ada pada saat itu adalah para birokrat tetap sepakat untuk lebih membentuk konsep *Garden City* di Jepang dengan tidak lebih memperhatikan implikasi keberadaan kota utama sebagai generator pertama tumbuhnya *Garden City*. Yang lebih menonjol dari konsep *Garden City* di awal adalah konsep *den'en* yaitu menumbuhkan *sense* desa dan kegiatan pertanian (*agriculture*) baik dalam konteks lingkup area perdesaan (*rural area*) maupun area perkotaan (*urban area*).

Kondisi politik pada masa Meiji yang membentuk otoritas pemerintah pusat sebagai kekuatan politik yang utama telah menyebabkan lemahnya otonomi pemerintahan lokal. Hal itu menyebabkan pembangunan kekuatan sipil masyarakat menjadi lemah karena ketiadaan kekuatan politik untuk berinspirasi dan melakukan inisiatif dalam berperan serta dalam pembangunan. Namun di akhir masa Meiji, kesadaran terhadap pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat. Ruang kebebasan pemerintah lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayahnya memang sudah sepatutnya diberikan. Pengetahuan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh sebuah wilayah merupakan ranah yang memang menjadi prioritas tanggung jawab pemerintah lokal. Namun, aksi-aksi pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah lokal masih sangat kuat dipengaruhi oleh kontrol dari pemerintah pusat, sehingga permasalahan pembangunan yang terjadi tidak dapat sepenuhnya direncanakan dan diselesaikan oleh pemerintah lokal.

Berbeda dengan negara-negara Barat yang telah dengan baik meningkatkan peran pemerintah lokalnya sehingga kompetensi dan kompetisi masyarakat dapat lebih terberdayakan, Jepang masih jauh dalam memposisikan kewenangan pemerintahannya untuk dapat memunculkan kebebasan lebih dalam membangun wilayahnya. Oleh karena itu, kebijakan Kampanye Kemajuan Daerah (*Local Improvement Campaign*) menjadi salah satu agenda di akhir masa Meiji untuk lebih meningkatkan kemandirian lokal dalam pengelolaan wilayahnya.

Bersamaan dengan penguatan lokal, '*rural*' menjadi konteks yang diusung dalam internalisasi konsep *Garden City* di Jepang karena melihat desa sebagai basis dalam pembentukan peradaban di Jepang. Pertanian tidak lagi sebagai kegiatan ekonomi semata tetapi lebih luas lagi, pertanian telah menjadi tradisi bagi masyarakat Jepang yang terkait dengan keyakinan terhadap bentuk kekuatan spiritual atau *kami*, sebagai bagian dari ritual Shinto. Peradaban Jepang yang dimulai dari komunitas desa tetap bertahan sampai dengan masa Tokugawa. Walaupun telah berkembang kota-kota sebagai pusat pemerintahan *Daimyo* (pemerintahan lokal) tetapi pertanian sebagai bentuk kegiatan perdesaan masih tetap bertahan dan tetap menjadi komoditas penting dalam ekonomi dan pajak negara serta menjadi penopang utama dalam pertahanan kota.

Namun ketika reformasi lahan dilakukan pada masa Meiji dan muncul kepemilikan lahan oleh individu, maka terdapat peningkatan jumlah petani kecil. Hal tersebut memberikan

pengaruh terhadap kesejahteraan para petani yang kemudian memunculkan kemiskinan di desa dan mengakibatkan berkembangnya area kota akibat urbanisasi para kaum petani tersebut. Pengembalian desa sebagai basis kegiatan mengimbangi pertumbuhan industri dianggap dapat mengatasi persoalan tersebut.

Watanabe dalam Ward (1992: 82) menjelaskan bahwa konsep *ruralization* yang terjadi pada *Garden City* di Jepang semakin menguat ketika terjadi bencana gempa bumi di Jepang. Kehancuran kota-kota utama dianggap sebagai sebuah awal bagi pembangunan kota baru yang mengarah pada konsep *den'en*. Konsep yang dianggap para kaum radikal akan dapat menjaga keberlanjutan kegiatan pertanian dan budaya lokal. Hal yang selama ini tidak terjadi pada perkembangan kota-kota utama di Jepang yang lebih mengarah pada materialisme.

Bentuk '*ruralization*' tersebut tentu berbeda dengan perkembangannya di barat. Barat tetap menganggap bahwa kota baru dengan konsep *Garden City* menjadi solusi bagi perkembangan kegiatan non-pertanian yang semakin pesat. Dengan mengacu pada konsep tersebut konsep kota masih menjadi inti pembahasan karena dengan konsep kota maka dinamisasi yang terjadi pada sebuah wilayah dapat diantisipasi terutama untuk permasalahan populasi dan fisik lingkungan. Ketika mengacu pada konsep *Garden City* maka keseimbangan pembagian guna lahan yang mengarah pada preservasi area pertanian serta ukuran kota yang tidak terlampau besar dalam hal luasan dan populasi menjadi gambaran ideal sebuah kota yang humanis pada masa tersebut. Berbeda dengan awal interpretasi di Jepang, *Garden City* dianggap sebagai sebuah awal bagi gerakan untuk kembali kepada kehidupan desa (*rural society*) dengan berbagai argumentasi yang menyertainya.

Dalam perkembangan selanjutnya, Konsep *Garden City* memiliki daya tarik bagi para kaum terpelajar di Jepang untuk mempelajarinya, terutama yang bekerja di dinas-dinas pemerintahan. Salah satu yang cukup berpengaruh adalah Hajime Seki seorang Mayor Deputi Kota Osaka. Dalam Watanabe dalam Ward (1992: 80) diuraikan bahwa Seki merupakan orang Jepang pertama yang telah mempelajari konsep *Garden City* dan memberikan penegasan mengenai perbedaan antara konsep *Garden City*, *Garden Suburb*, dan *Garden Village*. Dalam tulisan yang diterbitkannya pada tahun 1913, Seki menegaskan bahwa konsep *Garden City* tidak hanya sekedar konsep yang membahas mengenai solusi kebutuhan permukiman yang layak bagi warga kota, tetapi yang lebih utama adalah secara makro tata ruang kondisi yang akan terbentuk dengan konsep ini dipandang mampu mengatasi dampak perkembangan ekonomi kapitalis yang terjadi di Jepang pada masa tersebut.

Kondisi di mana perkembangan ekonomi nasional yang pesat terjadi telah menyebabkan perluasan area kota serta pemusatan jumlah penduduk di kota-kota utama. Selain berakibat pada dehumanisasi area kota utama baik secara fisik maupun sosial budaya, perubahan sektor utama dalam perekonomian nasional yang beralih ke industri juga telah menyebabkan kesenjangan antara kota-kota utama dengan wilayah disekitarnya yang sifatnya masih perdesaan. Namun di sisi lain, Seki juga melihat konsep penyebaran konsentrasi penduduk dan kegiatan industri dalam konsep *Garden City* bukan hal utama yang harus dipahami. Pemahaman mendasar mengenai penerapan konsep ini di Jepang lebih mengarah pada perencanaan area suburban metropolitan (*suburb metropolitan*) dibandingkan dengan pembangunan kota baru. Seki juga menekankan, sangat penting bagi

pemerintah kota untuk mencari tahu penerapan konsep *Garden City* yang paling tepat bagi kotanya masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut maka implementasi konsep *Garden City* di Jepang tidak mengarahkan *Garden City* sebagai sebuah *self contained area* tetapi lebih mengarah pada *settlement area*. Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Howard mengenai *Garden City* seperti yang dikutip oleh Oshima (1996) yaitu:

“The Garden City is not a suburb, but the antithesis of a suburb: not a mere rural retreat, but a more integrated foundation for an effective urban life.” (Howard dalam Oshima, 1996: 141)

Dalam pernyataan tersebut, Howard menegaskan kota sebagai inti dari pembangunan *Garden City* dengan menerapkan konsep penggunaan lahan yang terintegrasi antara kota dengan unsur-unsur lain yang menyertainya seperti pusat kegiatan ekonomi, area-area permukiman, dan keberlanjutan area-area pertanian sebagai pendukung wilayah baik dari segi fisik maupun ekonomi.

Dalam masa perkembangan konsep *Garden City* yang terjadi di Jepang pada saat itu maka terdapat kota yang menjadi bentuk implementasi konsep *Garden City* di Jepang. Di antaranya adalah Den'enchofu yang berada di luar Kota Tokyo. Den'enchofu merupakan implementasi konsep *Garden City* yang dibangun secara bertahap mulai tahun 1918. Kota tersebut telah terbukti sebagai bagian dari bentuk penerapan *Garden City* di Jepang dilihat dari segi latar belakang pembangunan dan konsep yang dibangun.

Pada tahun-tahun selanjutnya, tepatnya sebelum Perang Dunia II, tidak terjadi

perkembangan konsep *Garden City* yang berarti. Namun, Watanabe dalam Ward (1992: 82-83) mengemukakan tiga pendapat yang patut untuk dicatat. Pendapat pertama diberikan oleh Shichiro Yuge, seorang peneliti dari Institut Tokyo yang mengeluarkan buku berjudul *Garden Cities of Britain* pada tahun 1926. Melalui buku tersebut Yuge menggambarkan konsep *Garden City* dengan ketepatan yang paling dekat dengan konsep aslinya. Namun, pernyataan yang diberikan hanya sebatas itu, tidak sampai memberikan pendapat mengenai perubahan konsep yang paling tepat untuk diterapkan di Jepang.

Kemudian pendapat kedua diberikan oleh seorang perencana dari *Home Ministry* yang bernama Kazumi Linuma. Dengan dasar pengetahuan yang diperolehnya dari pertemuan *the International Federation for Town and Country Planning and Garden Cities* pada tahun 1927, Linuma menyodorkan sebuah konsep *regional planning* melalui bukunya *City Planning Theory and Law*. Dalam hal ini, konsep *Garden City* dianggap memiliki esensi penting bagi pembentukan *regional area* terutama sebagai dasar bagi perencanaan kota-kotanya.

Terakhir, pendapat dikemukakan oleh Hideaki Ishikawa melalui buku *Feasibility of Garden City in Japan* pada tahun 1930. Di dalam buku ini Ishikawa lebih mengkritik konsep *Garden City* yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Jepang. Ishikawa berpendapat bahwa pencapaian konsep asli *Garden City* didasarkan pada kondisi di Inggris pada masa itu. Padahal terdapat perbedaan mendasar antara kondisi di Inggris dengan di Jepang ketika berbicara mengenai aspek sosial dan ekonomi. Melalui studi perbandingan, Ishikawa melihat tingginya nilai tanah dan tingkat bunga di Jepang menjadi penghalang bagi implementasi konsep *Garden City*.

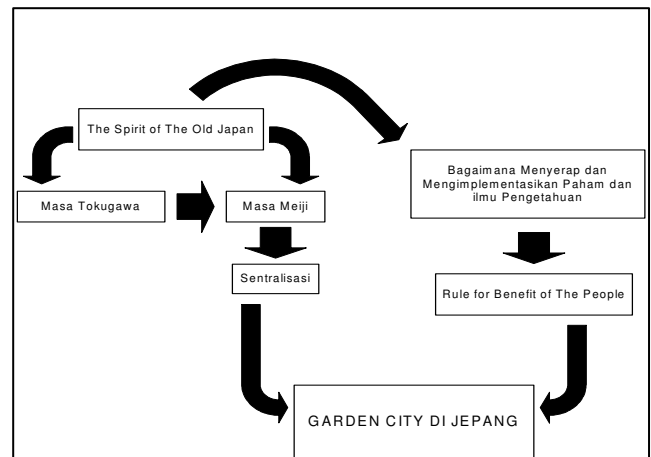
Tabel 4.1 Sejarah Penerapan *Garden City* di Jepang

Tahun	Masa Perkembangan	Keterangan
1868	Restorasi Meiji	Peralihan Kekuasaan Shogun-Kaisar
1868-1912	- Kekaisaran Meiji - Westernisasi dan modernisasi - Kebijakan industri nasional	- Kekuasaan Kaisar Meiji - Industrialisasi - Peningkatan infrastruktur administrasi - Transfer teknologi - Peningkatan aksesibilitas kota terhadap kegiatan industri - Peningkatan jaringan kereta api nasional - Pembentukan <i>Local Government</i>
1886-1905	Perkembangan ekonomi modern	- Urbanisasi - Perluasan area kota <i>Suburban living</i>
1912-1926	Kekaisaran Taisho	Kekuasaan Kaisar Taisho
1905-1930	Internalisasi konsep <i>Garden City</i>	- Konsep <i>Den'en Toshi</i> - Perkembangan konsep menuju <i>ruralization</i> - Perkembangan konsep menuju <i>Garden City Suburb</i>
1918-1927	Pembangunan <i>Garden City</i> Jepang	- Den'enchofu (1918) di suburban Tokyo - Senriyama (1920) di suburban Osaka
1926-1930	Pembelajaran konsep <i>Garden City</i>	Munculnya pendapat dan buku membahas <i>Garden City</i>
1920-	Perkembangan perencanaan area metropolitan	Adaptasi konsep <i>Garden City</i> terhadap perencanaan regional Jepang

Sumber: Olahan Penulis, 2008

3.4 Den'enchofu sebagai Gambaran Kota *Garden City* di Jepang

Rencana dan pembangunan Den'enchofu sebagai bentuk implementasi konsep *Garden City* dilakukan pada masa Kekaisaran Taisho yaitu pada tahun 1912-1926. Oleh Sorensen (2002: 137), perusahaan Eichi Shibusawa yang dikenal sebagai *Den'en Toshi Company* mulai



Gambar 2. Konseptualisasi Implementasi *Garden City* di Jepang

Sumber: Olahan Penulis, 2008

merencanakan pembangunan Den'enchofu pada tahun 1918. Den'enchofu direncanakan akan dibangun pada area luar Kota Tokyo yaitu di Distrik Sensoku (18 hektar) dan Tamagawadai (10 hektar).

Adapun langkah pertama dalam pembangunan *Garden City* Jepang ini dimulai dengan pembangunan jaringan rel kereta api yang langsung menghubungkan Den'enchofu dengan Kota Tokyo. Bekerjasama dengan Kintaro Yabe sebagai arsitek dalam pembangunan Den'enchofu ini, maka terbentuklah desain kota yang masih terpengaruh oleh konsep asli *Garden City* yang memakai pola radial. Pola radial yang terbentuk serta suasana yang diadopsi lebih mengarah pada suasana area suburban di St. Francis Wood di San Fransisco, USA dan pola konsentris yang terdapat di sekitar the Arch of Triumph di Paris, Perancis. Secara arsitektural pun, terdapat beberapa macam bentuk bangunan yang dibangun pada area permukiman Den'enchofu. Beberapa konsep bangunan tersebut merupakan campuran antara karakter Jepang dan barat.

Walaupun idealisme awal Eiichi Shibusawa dalam mengembangkan Den'enchofu ingin



Gambar 3.

Site Plan Den'enchofu dengan Sungai Tama di sebelah Barat dan Jaringan Kereta Apinya (1924)

Sumber: Oshima, 1996, p: 142

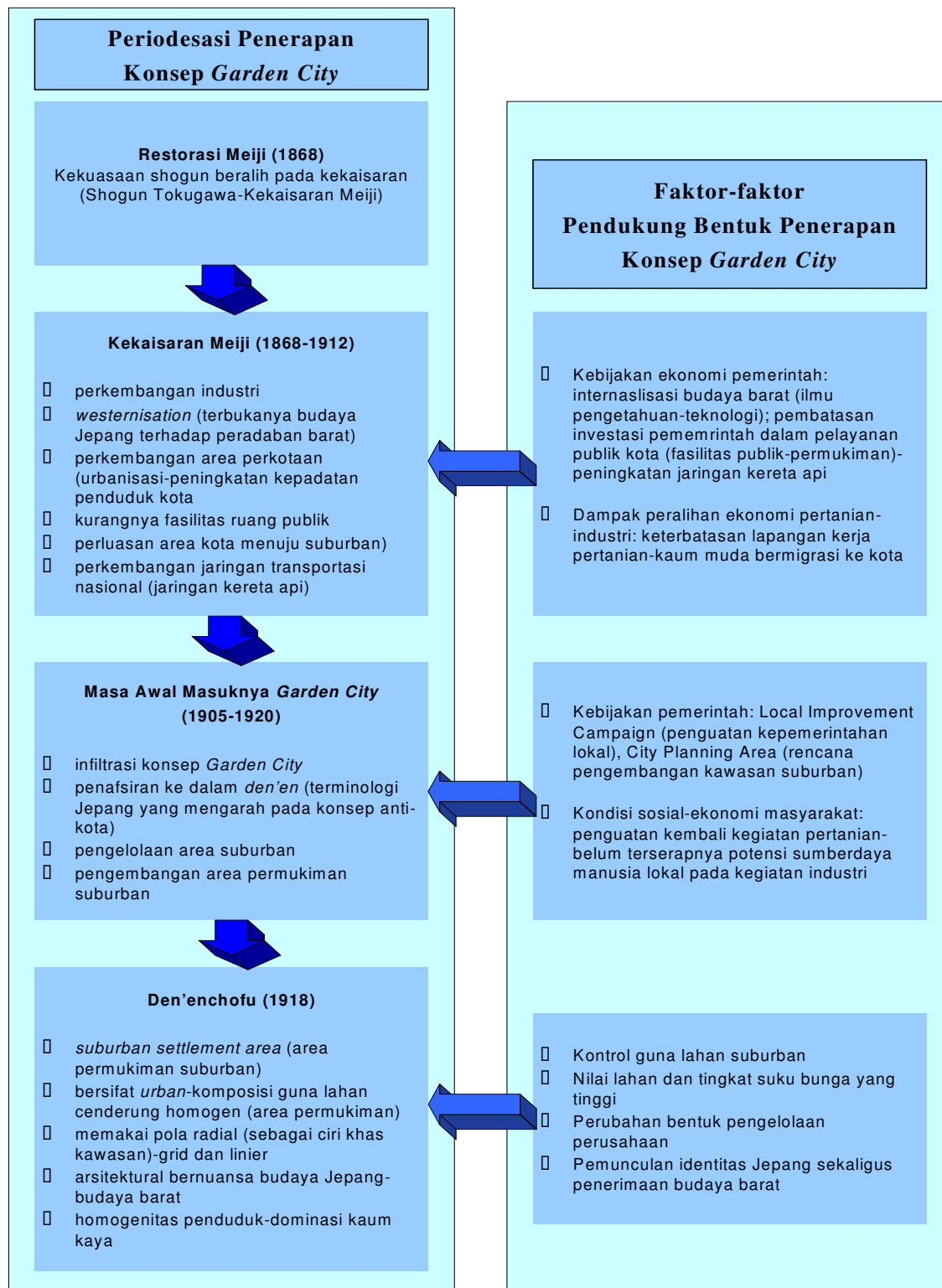
agar konsep *self contained* dan *self sufficient* dapat diadopsi, namun dinyatakan oleh Oshima (1996: 146) pada kenyataannya konsep tersebut tidak betul-betul direncanakan. Konteks ketersediaan lapangan kerja massa bagi penduduk kota dalam bentuk industri tidak termasuk ke dalam alokasi penggunaan lahan kota. Konsep *self contained* dan *self sufficient* baru tercermin pada ketersediaan fasilitas penunjang dan pelayanan bagi penduduk kota. Hal tersebut terlihat dengan keberadaan area komersial yang terbentuk yang menjadi area bagi kegiatan ekonomi konsumsi belum sampai pada kegiatan produksi. Pengembangan area dan kegiatan industri pada Den'enchofu tidak direncanakan karena para perencana kota tersebut beranggapan bahwa penduduk adalah para penglaju dari kota utama Tokyo.

Dalam implementasi Den'enchofu, konsep '*ruralization*' yang didengungkan sama sekali

tidak terlihat. Sebaliknya, yang terjadi adalah pengembangan area yang seluruhnya berkonsep kota. Pola penggunaan lahan yang idealnya mendukung kegiatan perkotaan sekaligus pertanian, tidak terdapat di Den'enchofu. Ciri perkotaan atau *urban* lebih terasa walaupun alokasi area preservasi ditunjukkan dengan adanya area-area hijau di sekitar Sungai Tama. Hal tersebut dapat menggambarkan pengaruh perkembangan area suburban sebagai area permukiman menjadi lebih dominan daripada pembentukan sebuah kota yang terencana dengan baik (*well planned town*). Hal tersebut pula yang kemudian turut mempengaruhi luas pembangunan kota selain dari pengaruh kebijakan pemerintah saat itu yang memang melakukan kontrol ketat terhadap bentuk-bentuk pembangunan. Terutama karena Den'enchofu dibangun di atas lahan baru yang sebelum merupakan pertanian yang tidak berkembang (Oshima, 1996: 143). Sehingga perencanaan yang ada haruslah sesuai dengan perencanaan area suburban Tokyo yang telah dimulai pada bulan Januari tahun 1920.

Rencana pengembangan area suburban pada akhirnya juga berpengaruh terhadap jarak Den'enchofu dengan Kota Tokyo sebagai kota utama yang tidak terlepas dari pola pemikiran awal bahwa Den'enchofu akan dibangun untuk para penglaju yang bekerja di Kota Tokyo, bukan sebagai kota yang mandiri. Konsep *settlement area* membuat Den'enchofu tidak memiliki perencanaan yang erat kaitannya dengan keseimbangan jumlah penduduk dan lapangan kerja. Tujuan perencanaan kemudian hanya bersandar pada kebutuhan permukiman bagi para pekerja penglaju dari Kota Tokyo.

Dengan kepemilikan lahan yang tidak bersifat sewa tetapi beli telah mengakibatkan Den'enchofu didominasi oleh kalangan menengah ke atas. Pengembangan tersebut



Gambar 4.
Skema Alur Implementasi Konsep *Garden City* di Jepang
Sumber: Olahan Penulis, 2008

pada akhirnya berdampak pada pembentukan homogenitas penduduk yang terjadi pada Den'enchofu. Terlebih Den'enchofu dibangun ketika terjadi bencana gempa bumi yang telah menghancurkan Kota Tokyo sehingga pengalihan kepemilikan lahan dan bangunan dapat beralih dengan cepat. Kebutuhan akan tempat tinggal yang tinggi telah meningkatkan permintaan jumlah rumah. Den'enchofu dianggap sebagai salah satu solusi tempat tinggal baru terutama bagi para kaum kaya kota yang melihat kota baru tersebut memiliki tingkat kenyamanan yang tinggi. Tidak hanya kebutuhan, tetapi kondisi harga jual dan tingkat bunga lahan dan properti yang tinggi di Jepang hanya mampu dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke atas yang mengakibatkan Den'enchofu tidak lagi berorientasi pada para pekerja di kota utama. Den'enchofu kemudian beralih menjadi kawasan permukiman elit yang terjual habis pada tanggal 5 Mei 1928 (Oshima, 1996: 149).

4. Kesimpulan

Di dalam penerapan konsep *Garden City* di Jepang, sejarah memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan cara berfikir masyarakat dan pemerintah. Melalui pengalaman sejarah, kemudian berkembang pembelajaran tentang sistem politik, ekonomi, dan sosial. '*Spirit of the Old Japan*', sebuah landasan masyarakat Jepang dalam menerima berbagai paham dan ilmu pengetahuan baru menjadi lebih kokoh dalam proses pencarian identitas bangsa. Prinsip loyalitas '*Rule For the Benefit of The People*' dan sentralisasi pemerintahan Jepang turut pula menjadi bagian dari bentuk implementasi pembangunan sebagai sebuah upaya pelayanan dan kesetiiaannya terhadap negara. Falsafah hidup dan sistem politik yang sentralistik tersebut merupakan hal penting yang membentuk *Garden City* di Jepang.

Pada awal infiltrasinya, *Garden City* mengarah pada prinsip '*ruralization*' dalam pembentukan tata ruang dan kegiatan kawasan. Hal ini merupakan rumusan solusi dari pemerintah yang ingin menyelesaikan permasalahan kota sekaligus desa sebagai dampak perkembangan ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya konsep pun berubah menjadi pembentukan ruang-ruang suburban sebagai area permukiman penduduk kota atau *suburban settlement area*. Perubahan ini merupakan bentuk sikap pemerintah dalam mempertahankan perkembangan ekonomi sebagai kekuatan negara dan mencoba menyeimbangkan permasalahan perkembangan kota dengan penyediaan area permukiman sebagai kebutuhan utama.

Dengan pembentukan kawasan yang tidak lagi berprinsip *self contained-self sufficient* seperti yang diharapkan konsep asli *Garden City* telah mempengaruhi implementasi dalam hal *zoning* yang ketat melalui pola guna lahan, bentuk ruang kawasan, dan perkembangan penduduknya. Guna lahan dan perkembangan penduduk yang terbentuk cenderung homogen. Guna lahan kawasan memiliki dominasi area permukiman yang membentuk ruang dinamis dengan pola ruang bercampus antara radial (sesuai dengan konsep *Garden City*) serta *grid* dan linier (ciri bentuk permukiman Jepang). Begitu pula dengan arsitektural bangunannya yang memiliki percampuran antara nuansa Jepang dengan barat. Kedua hal tersebut merupakan gambaran tentang eksistensi identitas yang diinginkan masyarakat Jepang dalam merencanakan dan membangun. Sedangkan homogenitas penduduk tercermin pada kelas sosial yang memiliki properti di *suburban settlement area* dengan dominasi para kaum kaya (masyarakat kelas atas).

Penciptaan kawasan regional yang dinamis merupakan salah satu tujuan dari pembentukan

tata ruang yang ada di dalam konsep *Garden City*. Memang konsep tersebut bukan hanya sebuah perencanaan mandiri yang tidak terkait dengan kawasan sekitarnya sama sekali. Tetapi yang paling penting adalah penciptaan kawasan regional yang harmoni dengan ketercukupan lapangan kerja dan fasilitas pelayanan serta daya dukung wilayah yang baik. Pembelajaran penting ketika berbicara keseluruhan mengenai konsep *Garden City* dapat dilihat melalui konteks makro terkait dengan pembentukan wilayah regional dengan keterkaitan spasial maupun fungsional. Pentingnya membangun jaringan transportasi yang sinergis, guna lahan yang kompak, ketersediaan permukiman yang layak, serta keberlanjutan dan kemandirian ekonomi kawasan, menjadi beberapa hal penting yang patut dicatat.

Dalam proses pembelajaran di Jepang, beberapa hal yang patut untuk dicatat adalah mengenai penyediaan jaringan transportasi massal yang terpadu, pengembangan area suburban sebagai solusi kebutuhan permukiman, dan kebijakan kepemilikan lahan dan properti. Contoh Jepang senantiasa mengutamakan pembentukan jaringan transportasi massal sebelum melakukan sebuah pembangunan patut untuk menjadi catatan penting. Transportasi massal yang efektif dan efisien menjadi bentuk kebutuhan bagi ketepatan waktu, kemudahan bermobilisasi, dan besaran massa yang dapat terjadi di dalam sebuah pergerakan. Pemikiran tersebut menjadi awal bagi solusi di masa depan terhadap peningkatan pergerakan yang pasti terjadi dalam setiap perkembangan suatu wilayah.

Jepang cukup tegas dalam menganggap jaringan transportasi kereta api sebagai wujud perekonomian nasional negara mereka. Ketika secara spasial, masing-masing kawasan telah memiliki keterkaitan dan keseimbangan

aksesibilitas maka hal tersebut diharapkan dapat mewujudkan hubungan fungsional yang saling mempengaruhi satu sama lain

Kebutuhan lainnya yang menjadi salah satu solusi dalam konsep *Garden City* adalah kebutuhan permukiman. Maka Jepang mengambil konsep *Garden City* sebagai solusi pengembangan kawasan suburban sebagai area permukiman. Belajar dari Jepang maka belajar dalam penyediaan ruang-ruang bagi area permukiman untuk semua masyarakat. Walaupun pada implementasinya terjadi ketidaktepatan sasaran, namun kegagalan Jepang dalam penyediaan permukiman layak bagi para pekerja kelas menengah ke bawah patut untuk diperhatikan. Fokus penyediaan permukiman dengan kebijakan finansialnya diharapkan dapat menjadi solusi bagi ketidakmampuan para miskin kota agar dapat mendapatkan tempat hidup yang layak. Sehingga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi kawasan dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Allinson, Gary D. (1979). *Suburban Tokyo*, California, University of California Press, p: 19.
- Catanese, Anthony J., and Snyder, James C. (1996). *Perencanaan Kota*, Jakarta, Erlangga, pp: 2, 15-16.
- Clark, Brett (2003). "Ebenezer Howard and The Marriage of Town and Country: An Introduction to Howard's Garden Cities of Tomorrow (Selections)", reprinted from *Journal Organization and Environment*, Volume 16, pp: 87, 88.
- Francks, Penelope (1990). *Japanese Economic Development*, London, Routledge, p. 31.
- Hall, John Whitney (1990). *Japan From Prehistory to Modern Times*, Tokyo, Fischer Bucherei GmbH, pp: 184,203,253,305.
- Home Ministry, dalam Watanabe, Sun-ichi. "The Japanese Garden City", dalam Ward, Stephen V. (1992). *The Garden City: Past, Present, and Future*, UK, Routledge, p. 71. Sumber: <http://www.books.google.com> (diakses: 11 Oktober 2007, 8:45 PM).

- Howard, Ebenezer (1967). *Garden Cities of Tomorrow*, USA, The MIT Press, pp: 51-55, 75, 92-93, 96-111, 139, 142, 144, 138-150, (reprinted and edited with a Preface by F. J. Osborn and an Introductory Essay by Lewis Mumford from the 1902 ed.). Sumber: <http://www.sacred-texts.com> (diakses: 18 Desember 2007, 11:00 AM).
- Moffitt, Nick. (2004). "Wheeled Transport and the Urbanization of Meiji Japan", pp: 6, 9. Sumber: <http://www.zork.net/~nick/railway.pdf> (diakses: 6 April 2008, 10.53 AM).
- Morton, W. Scott. (1984). *Japan Its History and Culture*, New York, McGraw-Hill, pp: 144, 153.
- Mumford, L. (1972). "The Garden City Idea and Modern Planning", dalam Clark, Brett (2003). "Ebenezer Howard and The Marriage of Town and Country: An Introduction to Howard's Garden Cities of Tomorrow (Selections)", reprinted from *Journal Organization and Environment*, Volume 16, p. 87.
- Oshima, Ken Tadashi. (1996). "Den'enchofu: Building the Garden City in Japan", *The Journal of the Society of Architectural Historians*, Vol. 55, No.2, (Jun., 1996), pp:140-143, 146, 149.
- Pyle, Kenneth B. (1988). *Generasi Baru Zaman Meiji: Pergolakan Mencari Identitas Nasional (1885-1895)*, Jakarta, PT. Gramedia, pp: 1-3.
- Rozman, G. (1973). "Urban Network in Ch'ing China and Tokugawa Japan", dalam Sorensen, Andre (2002). *The Making Of Urban Japan: Cities and Planning from Edo to the Twenty First Century*, UK, Routledge, p. 56.
- Simonds, John O. (1994). *Garden Cities 21: Creating A Liveable Urban Environment*, USA, McGraw-Hill Inc., pp: 209-211.
- Sorensen, Andre (2002). *The Making Of Urban Japan: Cities and Planning from Edo to the Twenty First Century*, UK, Routledge, pp: 48, 49, 53-58, 60, 84-89, 137.
- Surakhmad, Winarno (1978). *Dasar dan Teknik Riset: Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung, Tarsito, pp: 123.
- Watanabe, Sun-ichi. "The Japanese Garden City", dalam Ward, Stephen V. (1992). *The Garden City: Past, Present, and Future*, UK, Routledge, pp: 69, 70, 72, 80, 82-83. Sumber: <http://www.books.google.com> (diakses: 11 Oktober 2007, 8:45 PM).
- Zahnd, Markus (1999). *Perancangan Kota Terpadu: Teori Perancangan Kota dan Penerapannya*, Yogyakarta, Kanisius, pp: 4, 37.